



Judul	: Kebijakan TKDD Dinilai Mampu Topang Ketahanan Pangan
Tanggal	: Selasa, 21 September 2021
Surat Kabar	: Media Indonesia
Halaman	: 11

Kebijakan TKDD Dinilai Mampu Topang Ketahanan Pangan

BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) mendorong kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 2022 untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

“Usulan Banggar untuk lebih mengoptimalkan serapan TKDD dan menopang pembangunan strategis adalah mengarahkan dana alokasi khusus (DAK) untuk memperkuat ketahanan pangan,” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah melalui keterangan tertulis, kemarin.

Banggar juga mengarahkan agar 40% anggaran dari alokasi DAK fisik digunakan untuk membangun sektor pertanian. Hal itu termasuk ragam infrastruktur yang turut menopang sektor pertanian.

Dukungan pada sektor pertanian juga didorong melalui penyaluran dana desa. Said bilang, Banggar mendorong agar 25% dari alokasi dana desa diarahkan untuk menopang sektor pertanian nasional.

“Tujuannya agar setidaknya tiga tahun ke depan sektor pangan kita mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri dan tidak banyak komponen pangan kita bergantung pada impor,” kata Said.

Adapun besaran anggaran TKDD 2022 yang disepakati oleh Banggar dan pemerintah ialah sebesar Rp770,4

triliun. Dana itu terdiri atas alokasi dana transfer ke daerah Rp702,4 triliun dan dana desa sebesar Rp68 triliun.

Dorongan untuk menopang sektor pertanian atau ketahanan pangan itu dinilai selaras dengan upaya Presiden Joko Widodo. Menurut Said, berbagai program bendungan yang telah dibangun oleh Presiden dapat diintegrasikan dengan saluran irigasi sekunder dan tersier.

Hal itu, imbuh Said, akan mempercepat pembangunan sektor pertanian yang juga diketahui menyerap tenaga kerja paling besar. Bahkan, ujarnya, selama pandemi sektor pertanian mampu bertahan dan menambah 2,77 juta pekerja.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah daerah belum mengoptimalkan TKDD dalam melakukan pembangunan di daerah. “Belum optimalnya TKDD dalam mendorong pembangunan di daerah,” kata Menkeu dalam raker bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (13/9).

Sri Mulyani menjelaskan kemampuan daerah dalam mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) sangat minim dalam tiga tahun terakhir. Itu tercermin dari porsi PAD dalam APBD yang hanya sekitar 24,7%, sedangkan hampir 70% berasal dari TKDD. (Mir/Ant/E-3)